

**HUBUNGAN INTEGRITAS DAN ETIKA APARATUR SEKTOR PUBLIK
TERHADAP KUALITAS DATA DAN KINERJA PELAYANAN
(STUDI KASUS BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA
SELATAN)**

***THE RELATIONSHIP BETWEEN INTEGRITY AND ETHICS OF PUBLIC
SECTOR APPARATUS AND THE QUALITY OF DATA AND SERVICE
PERFORMANCE
(A CASE STUDY OF THE CENTRAL STATISTICS AGENCY OF SOUTH
SUMATRA PROVINCE)***

**Meilinda Puspita Sari¹, Mallika Syafitri², Melisyah³, Nailah Anindya Athaullah⁴,
Mikrajatun Nazillah⁵, Nadhya Dianisya Alza⁶, Salmaniah Riska Puteri⁷, Nabila
Chairunnisa⁸, Yolla Sakinah Tasti⁹, Igusti Ayu Kharisya KMA¹⁰, Riza Adelia Suryani¹¹**
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
Email: meilindapuspita@gmail.com

Article Info**Article history :**

Received : 23-02-2026

Revised : 24-02-2026

Accepted : 26-02-2026

Published : 28-02-2026

Abstract

Integrity and ethics are fundamental principles in public sector governance, particularly in institutions responsible for providing official state data. The Central Statistics Agency (BPS) plays a strategic role in producing accurate, objective, and credible statistical data as a basis for formulating public policies and development planning. This study aims to analyze the relationship between integrity and ethics among public sector officials and data quality and service performance at the Central Statistics Agency of South Sumatra Province. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with structural officials, technical staff, and data service users, and strengthened through documentation. These data were then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show that consistent implementation of integrity and ethics, reflected through honesty, professionalism, adherence to standard operating procedures, and accountability, significantly impacts data accuracy and credibility as well as public service performance. Furthermore, leadership commitment and an effective internal oversight system contribute to strengthening ethical behavior and institutional integrity. This study concludes that strengthening the integrity and ethics of public sector officials is a key factor in improving data quality, public service performance, and maintaining public trust in government institutions.

Keywords: ethics, integrity, public sector

Abstrak

Integritas dan etika merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan sektor publik, khususnya pada lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data resmi negara. Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam menghasilkan data statistik yang akurat, objektif, dan kredibel sebagai dasar perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan integritas dan etika aparatur sektor publik terhadap kualitas data serta kinerja pelayanan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pejabat struktural, staf teknis, serta pengguna layanan data dan diperkuat melalui dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai integritas dan etika secara

konsisten, yang tercermin melalui kejujuran, profesionalisme, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, dan akuntabilitas, berpengaruh signifikan terhadap akurasi dan kredibilitas data serta kinerja pelayanan publik. Selain itu, komitmen pimpinan dan sistem pengawasan internal yang efektif turut memperkuat perilaku etis dan integritas kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas dan etika aparatur sektor publik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas data, kinerja pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Kata kunci: Etika, Integritas, Sektor Publik

PENDAHULUAN

Integritas dan etika merupakan nilai fundamental dalam penyelenggaraan sektor publik karena menjadi landasan utama bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Aparatur yang menjunjung tinggi integritas dan etika akan bertindak jujur, profesional, bertanggung jawab, serta konsisten antara nilai, sikap, dan tindakan. Sebaliknya, lemahnya penerapan integritas dan etika berpotensi menimbulkan penyimpangan perilaku, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Dunn, 2018: 45). Dalam konteks tata kelola pemerintahan, integritas dan etika aparatur tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai instrumen pengendali perilaku birokrasi agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional. Etika aparatur pemerintah berperan dalam mengatur hubungan antara aparatur dengan masyarakat, sesama aparatur, serta institusi negara, sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi semakin penting pada lembaga yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan statistik nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Sebagai penyedia data statistik resmi negara, BPS dituntut untuk menghasilkan data yang akurat, objektif, dan kredibel. Kualitas data statistik sangat bergantung pada integritas dan etika aparatur dalam setiap tahapan kegiatan statistik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data. Apabila aparatur tidak menjunjung nilai integritas dan etika, maka kualitas data yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kebijakan publik. BPS Provinsi Sumatera Selatan sebagai perpanjangan tangan BPS di tingkat daerah memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik regional yang digunakan oleh pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan integritas dan etika aparatur di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Selatan menjadi aspek krusial dalam menjaga kualitas data serta kinerja pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan integritas dan etika aparatur sektor publik terhadap kualitas data dan kinerja pelayanan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam penerapan integritas dan etika aparatur sektor publik serta hubungannya dengan kualitas data dan kinerja pelayanan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Metode studi kasus memungkinkan peneliti menggali fenomena secara

kontekstual sesuai dengan kondisi nyata di lingkungan kelembagaan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses penyelenggaraan statistik dan pelayanan publik. Informan terdiri atas: (1) satu pejabat struktural yang memahami kebijakan serta pengawasan internal terkait integritas dan etika aparatur, (2) dua staf teknis yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data statistik, serta (3) dua pengguna layanan data, yaitu mahasiswa tingkat akhir dan pengguna eksternal yang pernah memanfaatkan data BPS untuk kepentingan akademik maupun penelitian. Pemilihan informan yang beragam ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif serta memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator integritas, etika aparatur, kualitas data, dan kinerja pelayanan publik. Dokumentasi yang digunakan meliputi standar operasional prosedur, kode etik Aparatur Sipil Negara, serta dokumen kelembagaan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan serta mencocokkannya dengan dokumen resmi untuk meningkatkan keabsahan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan integritas aparatur di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tercermin melalui komitmen terhadap kejujuran, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan statistik. Menurut pejabat struktural yang diwawancarai, integritas merupakan prinsip utama dalam menjaga kredibilitas lembaga. Ia menyampaikan bahwa setiap aparatur diwajibkan bekerja sesuai prosedur dan kode etik guna memastikan data yang dihasilkan tetap objektif serta bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan internal dinilai berperan penting dalam menjaga konsistensi perilaku etis aparatur. Dari perspektif staf teknis, penerapan integritas terlihat dalam proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara teliti dan berlapis. Salah satu staf menyatakan bahwa proses verifikasi dilakukan berulang untuk meminimalkan kesalahan input dan menjaga akurasi data. Staf lainnya menambahkan bahwa integritas sering kali diuji ketika menghadapi tekanan waktu dan target pekerjaan, sehingga profesionalisme dan disiplin kerja menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data statistik.

Sementara itu, dari sisi pengguna layanan, mahasiswa tingkat akhir yang memanfaatkan data BPS untuk penelitian menyatakan bahwa data yang diperoleh dinilai konsisten, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Pengguna eksternal lainnya juga menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat transparan, responsif, dan komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika pelayanan berkontribusi terhadap kepuasan serta kepercayaan pengguna terhadap institusi. Analisis temuan menunjukkan bahwa integritas dan etika aparatur memiliki hubungan yang erat dengan kualitas data dan kinerja pelayanan publik. Konsistensi antara kebijakan struktural, pelaksanaan teknis, dan pengalaman pengguna memperlihatkan adanya keselarasan nilai integritas di tingkat manajerial maupun operasional. Temuan ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang menyatakan bahwa perilaku etis aparatur publik merupakan faktor

penting dalam menjamin kualitas kinerja sektor publik. Dengan demikian, penguatan integritas dan etika aparatur tidak hanya berdampak pada kualitas data statistik, tetapi juga pada peningkatan kinerja pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integritas dan etika aparatur sektor publik memiliki makna strategis dalam menjaga kualitas data statistik dan kinerja pelayanan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Integritas dan etika tidak hanya berfungsi sebagai nilai normatif, tetapi juga menjadi pedoman perilaku aparatur dalam memastikan objektivitas, akurasi, serta akuntabilitas data yang dihasilkan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan integritas dan etika aparatur terhadap kualitas data dan kinerja pelayanan telah terjawab secara konseptual dan empiris. Hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai informan menunjukkan adanya konsistensi penerapan integritas dan etika di tingkat struktural maupun operasional. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan integritas dan etika aparatur perlu dipandang sebagai bagian penting dari upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap data statistik dan institusi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perilaku aparatur yang profesional dan beretika. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam strategi penguatan integritas dan etika aparatur melalui kebijakan kelembagaan, pelatihan berkelanjutan, serta sistem pengawasan internal yang efektif

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (5th ed.). New York: Routledge.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2016). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2018). *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Malang: Intrans Publishing